

Penyaluran Dana Desa di HST Capai 99,61 Persen, Begini Rinciannya



Sosialisasi Percepatan Realisasi dan Pelaporan Dana Desa di Pendopo Bupati HST, Selasa (8/10/2024)

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Sosialisasi-Pelaporan-Dana-Desa.jpg>

Penyaluran dana desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sudah mencapai 99,61 persen. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) HST, Edy Rahmawan menyatakan hal tersebut pada sosialisasi percepatan realisasi dan pelaporan dana desa, paparan indeks desa membangun, program BPJS Ketenagakerjaan segmen penerima upah bagi pemerintah desa tahun 2024 di Pendopo HST, Selasa (8/10/2024).

Edy mengatakan, berdasarkan data per 7 Oktober 2024, total penyaluran ke rekening kas desa (RKD) telah mencapai Rp 123.987.104.800, dari total alokasi sebesar Rp 129.247.279.000.

"Dari total dana yang telah disalurkan, persentase yang dilaporkan pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) baru mencapai 52,22 persen atau sekitar Rp 64.751.747.105," ujarnya.

Edy mengatakan, jika dibandingkan dengan data real-time Siskeudes yang mencapai Rp 78.234.072.165, masih terdapat selisih sekitar 17,28 persen data yang belum tercatat.

Berkaitan dengan hal itu, Edy pun mengakui, terus mendorong untuk mengambil langkah strategis di antaranya pemerintah desa (Pemdes) didorong untuk segera melakukan realisasi penyerapan dana desa 2024.

"Tak hanya itu, kami juga meminta untuk kemudian melakukan input secara real time pada aplikasi Siskeudes dana desa yang telah direalisasikan, finalisasi SPP dan input penerimaan desa secara benar," ujarnya.

Edy mengatakan, selanjutnya menggunakan tools ekspor data pada aplikasi Siskeudes untuk mengirim data realisasi secara otomatis ke aplikasi OMSPAN, sehingga tidak terdapat selisih data realisasi dan pelaporan

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Hulu Sungai Tengah (HST), Edy Rahmawan menyebut bahwa penyaluran dana desa sudah mencapai 99,61 persen.

Hal itu disampaikan pada sosialisasi percepatan realisasi dan pelaporan dana desa, paparan indeks desa membangun, program BPJS Ketenagakerjaan segmen penerima upah bagi pemerintah desa tahun 2024 di Pendopo HST, Selasa (8/10/2024)

Berdasarkan data per tanggal 7 Oktober 2024, total penyaluran ke RKD (rekening kas desa) telah mencapai Rp123.987.104.800, dari total alokasi sebesar Rp129.247.279.000.

Dari total dana yang telah disalurkan, persentase yang dilaporkan pada aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) baru mencapai 52,22 persen atau sekitar Rp64.751.747.105.

"Jika dibandingkan dengan data real-time Siskeudes yang mencapai Rp78.234.072.165, maka masih terdapat selisih sekitar 17,28 persen data yang belum tercatat," lanjutnya.

Kata dia, pihaknya pun mendorong untuk mengambil langkah strategis. Di antaranya, pemerintah desa (pemdes) didorong untuk segera melakukan realisasi penyerapan dana desa tahun 2024.

Kemudian, melakukan input secara real time pada aplikasi Siskeudes dana desa yang telah direalisasikan, finalisasi SPP dan input penerimaan desa secara benar.

Berikutnya, menggunakan tools ekspor data pada aplikasi Siskeudes untuk mengirim data realisasi secara otomatis ke aplikasi Omspan sehingga tidak terdapat selisih data realisasi dan pelaporan

"Serta, input laporan dana desa Earmark seperti BLT (bantuan langsung tunai), ketahanan pangan, dan stunting pada aplikasi OMSPAN," imbuhnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Pjs Bupati HST, Faried Fakhmansyah, sejumlah Kepala SKPD, BPJS Ketenagakerjaan Kalsel dengan peserta yang hadir yakni Pambakal (Kepala Desa), Lurah, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) hingga para Camat se-Kabupaten HST.

Sumber berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/10/09/penyaluran-dana-desa-di-hst-capai-9961-persen-begini-rinciannya>.
2. <https://pojokbanua.com/kadis-pmd-hst-peny-aluran-dana-desa-capai-9961-persen/>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani

- d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
- 2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
- 3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan Desa wisata
- 4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
 - a. pemanfaatan energi terbarukan
 - b. pengelolaan lingkungan Desa
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional

- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
4. Pengembangan seni budaya lokal
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).